

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- A. Muhammad Arfah Pattenreng. 2019. *Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah (Suatu Kajian Komprehensif)*. Ed. 3. Bosowa Publishing Group. Makassar.
- A. P. Parlindungan. 1994. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Ed. 2. Cet. 2. Bandung:Mandar Maju
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Quo Vadis Pendaftaran Tanah*. Makassar:PUKAP.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta:Kencana.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Cet. 1. Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Dewi Kania Sugiharti. et.al. 2021. *Hukum Pajak*. Cet. 1. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.
- H. M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Henry Sinaga. 2018. *Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik (Kompilasi Tulisan tentang Carut-Marut Regulasi di Indonesia)*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ed. Revisi. Cet. 4. Yogyakarta:Mirra Buana Media.
- Muhammad Djafar Saidi. 2022. *Pembaruan Hukum Pajak*. Ed. Baru. Cet. 6. Depok:Rajawali Pers.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Noer Fauzi Rachman. 2016. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*. Cet. 2. Yogyakarta:INSISTPress.
- R. Supomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 5. Jakarta:Pradnya Paramita.
- o. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 26. Bandung:Alfabeta.
- o Soimin. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta:Sinar Grafika.



Suharno. 2021. *Strategi Efektif Membangun Personal Branding dan City Branding*. Pasuruan:Qiara Media.

Tadjuddin Rachman. 2017. *Tanah dan Jaminan Kepastian Hukum*. Jakarta:Yapensi.

Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta:Kencana.

----- . 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta:Kencana.

----- . 2017. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta:Kencana.

Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan (Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif)*. Cet. 1. Yogyakarta:Thafa Media.

Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika.

B. KARYA ILMIAH:

SKRIPSI:

Nadika Riski Afiah. 2022. *Alas Hak Pemanfaatan Pulau Khayangan di Kota Makassar Oleh PT Putra Putra Nusantara*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Syamsur. 2021. *Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Makassar*. Sripsi. Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

THESIS:

Sri Wijayanti. 2010. *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

C. JURNAL:

Cynthia Carolina. 2022. *Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/PDT/2023)*. Indonesian Notary, Volume 4, Article 11.



disiswati. 2014. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah*. AHKAM. Volume 2 Nomor 1. IAIN. Tulungagung.

nad Nadzir Suwandi. 2017. *Kekuatan Pembuktian Surat eterangan Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah*. Jurnal De Facto. Volume 4 Nomor 1. UNIBA. Balikpapan.

Suparjo Sujadi. 2008. Status Tanda Pembayaran Pajak Hasil Bumi (Refleksi Ketidakharmonisan Sistem Recht Kadaster dan Fiscaal Kadaster Memberikan Keadilan). Jurnal Hukum & Pembangunan. Scholar.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

E. YURISPRUDENSI:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1102 K/Sip/1975

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 K/Sip/1975

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960

F. SUMBER INTERNET:

Universitas Medan Area. 2021. *Pajak Bumi dan Bangunan*.
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/15/pajak-bumi-dan-bangunan/>.

diakses pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 23.20 WITA.

Hery Shietra. 2017. *Alas Hak Artinya Dasar Keberadaan*.
<https://www.hukum-hukum.com/2017/03/alas-hak-dasar-keberadaan.html>. diakses pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 14.00 WITA.

BAPENDA Kota Bogor. 2017. Bentuk-bentuk pelayanan PBB P2 di Badan Pendapatan Daerah.
<https://bapenda.kotabogor.go.id/articles/view/pbb-p2>. diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 00.40 WITA.

Listiyarko Wijito, 2012, "Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan", Berita Sekretariat Badan Kementerian Keuangan, edisi tanggal 28 Desember 2022.
<https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan-154816>. diakses pada 11 September 2023 pukul 10.35 WITA.

BAPENDA Kota Madiun. 2023. *Apasih SPPT PBB itu*.
<https://bapenda.madiunkota.go.id/2023/11/08/apasih-sppt-pbb-itu/>. diakses pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 23.50 WITA.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Telepon: (0471) 3316034 email: kab-luwu@atrbpn.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 714/SKet-73.17.UP.02.03/VIII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martini, S.H.
NIP : 198105012006042003
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fetronela Grace Julianti
Prodi : Ilmu Hukum
No. Pokok : B011191270
Alamat : Jl. Lanraki, Perumahan D'Palada Cyber Residence, Blok 3M

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Alas Hak dalam Sengketa Pertanahan di Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 04 Agustus 2023

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Luwu
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Martini, S.H.
NIP 198105012006042003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

V 1.04

Melayani, Profesional, Terpercaya



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994
Telepon/Faks (0471) 3314518 Email: bapenda@luwukab.go.id
Website: bapenda.luwukab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/2023 /BAPENDA/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI PALANGGI, S.STP
NIP : 198311142003121001
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FETRONELA GRACE JULIANTI
NIM : B011191270
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 10 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Lanraki, Perumahan D'Palada Cyber Residence, Blok 3M

Telah melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Luwu dengan Judul Penelitian "*Tinjauan Hukum Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Alas Hak Dalam Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Luwu*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 08 Agustus 2023

ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198311142003121001

CS Scanned with CamScanner



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PENGADILAN NEGERI BELOPA

Jln Sawerigading Kel.Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu Prov Sulawesi Selatan

Telp. 04713207765 Fax.

Website: pn-belopa.go.id Email: pnbelopa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arrang Baturante, S.H.

Jabatan : Panitera Muda Hukum, S.H

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Belopa

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang berindetitas:

Nama : Fetronela Grace Julianti

Stanbuk : B011191270

Program Studi : Ilmu Hukum

Sekolah/Univ : Universitas Hasanuddin

Telah selesai melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Belopa, terhitung mulai 16 Agustus 2023 s/d 16 Agustus 2023- Dalam Rangka Penyusunan "Skripsi" Dengan Judul **TINJAUAN HUKUM SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ALAS HAK DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN LUWU.**

Dengan surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Negeri Belopa
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

Arrang Baturante, S.H.
nip.198408182014032001





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG
DESA WALENRANG**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 472/DW-KW/VIII/2023

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : ALFRIDA, SE
Jabatan : Sekretaris Desa Walenrang
Alamat : Desa Walenrang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : FETRONELA GRACE JULIANTI
Tempat/tgl Lahir : Palopo, 10-07-2001
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn Parembonan Selatan, Desa Walenrang, Kec. Walenrang, Kab.
Luwu

Benar-benar telah melakukan penelitian pada tanggal 11 Agustus 2023 di Desa Walenrang, Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk menyusun Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ALAS HAK DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN LUWU".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



11 Agustus 2023
An. Kepala Desa Walenrang





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI
DESA TO' PONGO

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 02/DT/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARSAN AKKE
Tanggal / Lahir : Lamasi, 11 Agustus 1980
Jabatan : Kepala Desa To'Pongo

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Fetronele Grace Julianti
Prodi : Ilmu Hukum
No. Pokok : B011191270
Alamat : Jl. Lanraki, Perumahan D'Palada Cyber Residence, Blok 3 M

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa To'Pongo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang berhubungan dengan Penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Alas Hak dalam Sengketa Pertanahan di Kabupaten Luwu "

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Agustus 2023
Kepala Desa To'pongo

ARSAN AKKE



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala BPN Luwu



Wawancara dengan Kepala Bidang PBB BAPENDA Luwu



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Belopa



Wawancara di Kantor Desa To'pongo



Wawancara di Kantor Desa Walenrang



ipulan data berupa kuesioner di Desa To'pongo



Pengumpulan data berupa kuesioner di Desa Walenrang

